

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surakarta

The Role Of The Department Of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control And Family Planning (Dp3ap2kb) In Preventing Violence Against Children In Surakarta

Kresna Dewangga¹, Sri Riris Sugiyarti²

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

kresnadewangga97@gmail.com, ririss68@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memengaruhi perkembangan fisik maupun psikologis anak. Kota Surakarta menghadapi masalah ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertanggung jawab dalam pencegahan. Penelitian ini menganalisis peran DP3AP2KB dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Penentuan informan menggunakan Teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan model interaksi Miles dan Hubberman. Hasil menunjukkan DP3AP2KB Kota Surakarta melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui lima indikator oleh Siagian (2005), stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Stabilisator dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, pemantapan FAS, sosialisasi Satgas PUSPAGA, dan penguatan Pokja KLA. Sebagai inovator, DP3AP2KB memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk publikasi FAS. Peran modernisator diwujudkan dengan layanan online, pengaduan ULAS, pelatihan Konvensi Hak Anak, dan peringatan Hari Anak Nasional. Sebagai pelopor, DP3AP2KB menyediakan layanan ramah dan menjaga kerahasiaan klien kekerasan. Dalam peran pelaksana, DP3AP2KB bekerja sama dengan APSAI, Forum Anak, Pos Pelayanan Terpadu, dan Satgas PUSPAGA. Meskipun program berjalan baik, faktor orang tua dan masyarakat masih berpengaruh, sehingga diperlukan pengembangan program komunitas dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Kekerasan, Anak, perlindungan anak.

Abstract

Child abuse is a serious problem that affects children's physical and psychological development. As Surakarta City faces this problem, the Office of Women's Empowerment,

Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) is responsible for prevention. This research analyzes the role of DP3AP2KB in preventing violence against children in Surakarta. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation. Determination of informants using purposive sampling technique . Data were analyzed using the Miles and Hubberman interaction model. The results showed that DP3AP2KB Surakarta City made efforts to prevent violence against children through five indicators by Siagian (2005), stabilizers, innovators, modernizers, pioneers, and implementers. Stabilizers are carried out through socialization of violence prevention in schools, strengthening FAS, socializing the PUSPAGA Task Force, and strengthening the KLA Working Group. As an innovator, DP3AP2KB utilizes social media, such as Instagram, for FAS publications. The role of modernizer is realized with online services, ULAS complaints, training on the Convention on the Rights of the Child, and commemoration of National Children's Day. As a pioneer, DP3AP2KB provides friendly services and maintains the confidentiality of clients of violence. In its implementing role, DP3AP2KB collaborates with APSAI, Children's Forum, Integrated Service Post, and PUSPAGA Task Force. Although the program is working well, parental and community factors are still influential, so there is a need to develop community programs and training to increase awareness and prevention of violence against children.

Keywords: *Government Role, Abuse, Children, Child Protection*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang serius dan berdampak luas, baik pada perkembangan psikologis maupun fisik anak. Kota Surakarta, seperti banyak kota lainnya di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan ini.

Pada tahun 2023, data dari DP3AP2KB Kota Solo mencatat 143 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan 80 kasus melibatkan anak-anak, dan 63 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana tercatat 104 kasus pada 2022. Kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari 70 kasus

pada 2022 menjadi 86 kasus pada 2023. Dilansir Dari Website <http://www.matanews.id/> diakses pada hari Minggu, 25 Februari 2024 jam 18.00.

DP3AP2KB Kota Surakarta berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Lembaga ini bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi anak-anak, sejalan dengan penghargaan yang telah diraih Surakarta sebagai Kota Ramah Anak sejak 2017. Namun, tingginya angka kekerasan terhadap anak bertentangan dengan tujuan program Kota Layak Anak yang bertujuan menjunjung tinggi hak-hak anak dan melindungi mereka.

Surakarta juga memiliki regulasi yang mendukung

pencegahan kekerasan anak, seperti Peraturan Walikota Nomor 25.1 Tahun 2021 yang mengatur peran DP3AP2KB. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam pencegahan kekerasan anak, yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, di mana pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta memegang peranan penting dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan anak, hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. daerah Kota Surakarta berperan penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan anak diperlukan agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan menurut Siagian (2005: 142) pada bukunya yang berjudul "Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya" menjelaskan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah memainkan peranan yang dominan.

Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta hadir untuk membantu masyarakat mengatasi kekerasan terhadap anak. DP3AP2KB merupakan instansi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan sosial khususnya kasus yang melibatkan anak di Kota Surakarta. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surakarta"

Peran, menurut Soekanto dan Budi (2014: 210-211), adalah aspek dinamis dari jabatan, yaitu perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukan seseorang. DP3AP2KB berperan sebagai pelindung dan pemberdaya, khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi, advokasi, dan kerjasama antar instansi untuk perlindungan anak (Siagian, 2005: 142). Anak, menurut UU No. 35 Tahun 2014, adalah individu di bawah 18 tahun, dan kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau emosional (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 No. 15A).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, anak adalah individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak juga berhak atas perlindungan hukum, pendidikan, jaminan sosial, serta hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan. Perlindungan anak meliputi perlindungan yuridis dan non-yuridis, mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Kamil, tanpa tahun).

Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, mental, seksual, atau emosional,

termasuk ancaman atau perampasan kebebasan (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 No. 15A). Suyanto (2010:28) menyebut kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak, sering dilakukan oleh orang terdekat. DP3AP2KB menangani kekerasan dan eksploitasi anak, termasuk bullying dan pelecehan seksual, dengan memberikan dukungan psikologis serta melibatkan keluarga untuk pemulihan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Sugiyono (2010: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai teknik, dan analisis data yang bersifat induktif.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling, Dengan kata lain merupakan teknik random sampling yang memilih sampel berdasarkan asumsi tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Artinya dengan cara ini akan diberikan jawaban yang sesuai dengan kasus yang diteliti (Lenaini, 2021: 34).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

a. Observasi

Menurut Sugiono (2014), observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan perempuan dan anak. Peneliti mengamati berbagai aspek pelaksanaan program di Kantor DP3AP2KB Kota Surakarta melalui kunjungan langsung, untuk melihat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak serta langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh dinas tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan terfokus antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengasuhan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta dua pekerja sosial di Kota Surakarta. Setiap wawancara berlangsung secara individual menggunakan panduan umum, di mana peneliti mencatat dan menyoroti poin-poin penting. Hasil wawancara kemudian dianalisis lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2014 : 240), dokumentasi adalah suatu catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Catatan tersebut bisa berbentuk tulisan, dokumen, atau sejarah. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa arsip yang menggambarkan berbagai kegiatan anti-kekerasan di kota Surakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di lapangan terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surakarta, yang diukur berdasarkan dari lima indikator yang dikemukakan oleh Siagian (2005) yaitu diantaranya stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DP3AP2KB Kota Surakarta telah menjalankan perannya sebagai stabilisator dalam menjaga kestabilan masyarakat menyusul peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan, antara lain: (1) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Sekolah, (2) Pemantapan FAS, (3) Sosialisasi Satgas PUSPAGA, serta (4) Penguatan Pokja KLA.
2. Melalui peran sebagai inovator, DP3AP2KB telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Beberapa kegiatan yang dilakukan termasuk program "FAS Publikasi" di platform Instagram serta penggunaan media sosial sebagai alat sosialisasi dan penyebaran informasi terkait isu ini.
3. Melalui perannya sebagai agen modernisasi, DP3AP2KB Kota Surakarta telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penggunaan teknologi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, antara lain:
 - 1) Pelayanan Online,
 - 2) Layanan Pengaduan "ULAS",
 - 3) Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, serta
 - 4) Peringatan Hari Anak Nasional.
4. DP3AP2KB Kota Surakarta telah berperan sebagai pelopor dalam menjadi contoh bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan. Kegiatan ini mencakup pemberian layanan yang sesuai dengan SOP, dilakukan secara ramah dan nyaman, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan bagi klien yang melaporkan kasus kekerasan.

5. DP3AP2KB Kota Surakarta telah menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas ini, mereka bekerja sama dengan berbagai organisasi terkait, seperti Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan Forum Anak Surakarta, yang bertindak sebagai pelopor dan pelapor. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta, serta Satgas Jejaring Puspaga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surakarta telah menjalankan program dan kegiatannya dengan baik, namun faktor orang tua dan masyarakat masih mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak, maka DP3AP2KB perlu mengembangkan program inovatif berbasis komunitas dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan orang tua dan masyarakat. Ini akan meningkatkan

kesadaran akan perlindungan anak serta pencegahan kekerasan dengan dukungan teknologi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, A. (n.d.). *Perlindungan anak*. [Publisher name not provided].
- Lenaini, A. (2021). *Random sampling and its assumptions in research*. Pustaka Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya* (7th ed.). Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Prenada Media.
- Website Mata News. (2024, February 25). Data kasus kekerasan anak dan perempuan di Surakarta tahun 2023. *Mata News*. <http://www.matanews.id>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.